

Rustam Anwar¹, Roni Mohamad², Muhdar HM³. Kuatkah APBN 2023 menghadapi guncangan resesi?²

Kuatkah APBN 2023 Menghadapi Guncangan Resesi Global ?

Rustam Anwar¹

Pacasarjana Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo¹²³

Email: rustamanwar101@gmail.com¹

Roni Mohamad²

Email: ronimohamad@iaingorontalo.ac.id²

Muhdar HM³

Email: muhdar73@gmail.com³

ABSTRACT

Keywords:

Recession, fiscal, growth, budget

In 2023 the world economy will experience a global economic recession. Anticipating the risk of Global economic slowdown, The Indonesian government respond through appropriate state budget fiscal policies while maintaining a reasonable rate of economic growth and controlling the budget deficit below 3 percent. This study uses a descriptive qualitative method looking at macro indicators of state budget. The result of this study prove that the 2023 State Budget is designed to have high resistance to recessionary shock.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Resesi, fiskal, pertumbuhan, anggaran

Tahun 2023 perekonomian dunia akan mengalami resesi ekonomi global. Mengantisipasi resiko pelemahan ekonomi secara global pemerintah indonesia meresponnya melalui kebijakan fiskal APBN yang tepat dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang wajar dan pengendalian defisit anggaran dibawah 3 persen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melihat indikator makro APBN. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa APBN 2023 dirancang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap guncangan resesi.

PENDAHULUAN

Resesi global merupakan keadaan ekonomi yang berdampak secara global dimana ekonomi tersebut mengalami deselerasi dan penurunan. Resesi ekonomi adalah masa di mana pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara turun secara signifikan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya, resesi ekonomi diukur dengan dua kuartal berturut-turut dari kontraksi PDB. Selain itu, resesi ekonomi juga dapat ditandai dengan peningkatan tingkat pengangguran, penurunan tingkat konsumsi, dan penurunan tingkat investasi.

Dikutip melalui acara tersebut Presiden Jokowi menyebutkan bahwa “*Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan (2023) mereka menyampaikan akan lebih gelap.*”. Presiden Jokowi sudah mulai waspada setelah mendapatkan bisikan dari sejumlah lembaga internasional. Tahun 2023 adalah tahun menantang, dunia mengalami kegelapan. Jokowi bahkan menyebut sebagai sebagai tahun gelap, akibat krisis ekonomi, pangan, hingga energi akibat dari fenomena-fenomena besar yang berpotensi dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi global seperti pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia-Ukraina.

Lembaga IMF sendiri memprediksi pada tahun 2023, lebih dari sepertiga ekonomi dunia akan mengalami kontraksi dengan perkiraan tingkat pertumbuhan dunia hanya akan mencapai angka 2,7 persen lebih rendah 0,2 persen dibanding pertumbuhan tahun 2022. (IMF, 2022). Ada 3 faktor utama penyebab akan terjadinya Resesi Global menurut IMF yaitu belum berakhirnya ketegangan politik rusia terhadap Ukraina, Krisis biaya hidup akibat inflasi dan perlambatan ekonomi cina.

Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, tentunya Indonesia akan ikut terpengaruh dengan kondisi tersebut. Menghadapi kondisi global yang tidak pasti ini pemerintah Indonesia tentu telah menyiapkan strategi kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan dampak resesi Global tersebut baik melalui kebijakan Moneter maupun fiskal.

Dari sisi kebijakan moneter, Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia tetap melakukan kebijakan pengetatan moneter dimana pada Bulan Desember 2022, menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Keputusan menaikkan suku bunga ini diambil sebagai langkah memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$.

Selanjutnya dari sisi Fiskal, gambaran kebijakan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari postur APBN 2023 yang telah disusun oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana ketentuan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut, dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara /APBN (Bernadhus) .

Olehnya itu, Postur APBN sendiri hakikatnya adalah cermin dari arah kebijakan perekonomian dalam suatu negara. APBN dapat didefinisikan sebagai “bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara”. Melalui Postur APBN, masyarakat dapat menilai kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, serta akuntabilitas Pemerintah. Pada hakikatnya, postur APBN menggambarkan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, serta akuntabilitas Pemerintah.

Jhon F Due (Bernadhus) dalam teorinya mengatakan terdapat tiga tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu: 1) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum. 3) Untuk menstabilkan harga – harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Berdasarkan teori ini APBN selanjutnya memiliki 3 fungsi yaitu : 1) Fungsi Stabilisasi, bertanggungjawab menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Tujuan utama dari fungsi stabilisasi kebijakan fiskal adalah memelihara tingkat pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan seperti itu, maka “kebijakan stabilisasi”seringkali dimaknai sebagai manipulasi dari permintaan agregat agar pada saat yang sama mencapai *full employment* dan stabilitas harga (*price stability*), 2) Fungsi Alokasi, Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat dilakukan dengan secara langsung membeli barang-barang seperti pertahanan dan pendidikan, dan secara tidak

Rustam Anwar¹, Roni Mohamad², Muhdar HM³. Kuatkah APBN 2023 menghadapi guncangan resesi?

langsung melalui berbagai pajak dan subsidi, yang mendorong berbagai aktivitas atau menghambat aktivitas-aktivitas lainnya, 3) Fungsi Distribusi, Berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan, dan *trade-offs* antara pemerataan dan efisiensi. Dari ketiga fungsi ini bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pengalaman Indonesia, di bulan Maret Tahun 2020, ketika Dunia diguncang oleh Pandemi Covid setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Corona Virus Disease 2019 sebagai Pandemi, Pemerintah Indonesia segera melakukan penyesuaian terhadap APBN 2020 untuk mengantisipasi dampak Pandemi terhadap stabilitas ekonomi negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. (Rasyidin, et al,2022).

Perubahan terhadap UU APBN adalah hal yang lazim dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai penyesuaian akibat guncangan (*shock*) internal atau eksternal atau guncangan kinerja ekonomi, kinerja pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun karena guncangan eksternal (ekonomi maupun non ekonomi).

Selama masa Pandemi, kondisi ekonomi dunia sangat terguncang, namun perekonomian nasional masih mampu tumbuh ditengah gejolak ekonomi yang rentan. Pada Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Banyak negara yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat 10%, dan Inggris 15%. Namun Indonesia justru mengalami ekspansi sebesar 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang mengalami pertumbuhan ekonominya positif.

Kajian pada penelitian ini menggunakan data perkembangan variabel pertumbuhan dari kementerian keuangan untuk mengetahui seperti apa gambaran kebijakan yang telah diambil pemerintah selama masa Pandemi sehingga menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi, bahkan mampu mencapai tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding negara lain.

LANDASAN TEORI

A. Resesi

Resesi merupakan keadaan dimana perekonomian obsolet. Resesi ini biasanya ditandai dengan PDB sebuah negara menjadi negatif dan mulai muncul pengangguran. World Bank melalui publikasinya yang berjudul "*Is a Global Recession Imminent?*" memproyeksikan bahwa tahun 2023 mendatang akan terjadi resesi global. Proyeksi ini semakin nyata dengan adanya indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Indikasi lainnya adalah banyak produsen-produsen mulai mengurangi jumlah produksinya akibat melemahnya permintaan pasar. Para penanam modal juga lebih memilih mengoper modalnya dalam mata uang dolar. Fenomena ultra-dollar memberi sinyal yang sangat kuat bahwa ekonomi dunia sedang bergerak menuju resesi, (Yobel, dkk, 2022).

Resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis yang dapat menyeluruh pada sektor ekonomi dan berlangsung dalam periode yang relatif lama dan akan berdampak terhadap penurunan pendapatan domestic brutto pada suatu negara, terjadi pemutusan hubungan kerja, menurunnya kemampuan beli masyarakat secara signifikan, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya kebangkrutan pada beberapa industri, dan sebagainya. Lebih lanjut menurut Harvey (1993) dalam Eneng, dkk (2022), resesi ditandai dengan adanya penurunan dari pendapatan domestik brutto selama dua kuartal berturut-turut. Adapun penyebab resesi adalah: 1) terjadinya guncangan ekonomi yang mendadak dan menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat akibat kesulitan keuangan, 2) Tingginya angka inflasi akibat harga sejumlah komoditas energi yang melambung, 3) Tingginya suku bunga yang diakibatkan oleh inflasi yang melambung tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan bank sentral menaikkan suku bunganya, dan diperparah dengan terjadinya daya beli dari masyarakat yang menurun.

Selain itu apabila ditinjau dari kondisi terjadinya resesi ekonomi, menurut Bavani dan Suselo (2021), adalah, 1) Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau *negative growth*, 2) Kondisi dimana jumlah impor pada negara tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah ekspor negara tersebut, 3) Meningkatnya jumlah pengangguran dikarenakan menurunnya jumlah lapangan pekerjaan, 4) Terjadi jumlah produksi yang tidak seimbang dengan konsumsi dikarenakan menurunnya permintaan konsumsi dari masyarakat.

Indonesia pernah mengalami resesi cukup besar dalam sejarah perekonomiannya yaitu pada 1998 yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Melonjaknya harga, turunnya nilai rupiah, tingginya tingkat PHK membuat awan kelam di masa itu. Sebagai strategi penyelamatan dari krisis 1998, paket subsidi likuiditas Bank Indonesia diterapkan untuk 16 bank. 670 miliar untuk reformasi hukum kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pemerintah berlutut untuk menandatangani perjanjian dengan IMF untuk paket bantuan (pinjaman) multilateral senilai \$43 miliar sebagai bagian dari memorandum kebijakan ekonomi dan moneter. Kondisi krisis ekonomi 1998 sangat buruk bagi kepemimpinan dan birokrasi yang korups. Rupiah telah terdepresiasi 254% tahun-ke-tahun terhadap dolar AS. Rp3.030 (Sep 1997), Rp10.725 (Sep 1998), yang berada di atas level Rp16.000 inflasi 78,2%, (Yobel, dkk, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmastuti dkk (2021) membahas mengenai kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi acamana resesi yang diakibatkan Covid-19. Terdapat kesamaan dalam penyebab resesi saat pandemi dan pada tahun 2023 yaitu scaring effect. Diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dari pemerintah untuk menangani pandemi dengan mengubah batasan defisit anggaran 3% dari PDB, dan mengalokasikan ulang APBN pada sektor yang berdampak besar pada perekonomian makro seperti pada sektor kesehatan, pengamanan sosial, insentif pajak dan stimulus UMKM. UMKM yang menjadi salah satu sektor penyumbang PDB terbesar harus dilakukan transformasi dengan pengenalan teknologi digital pada kegiatan bisnis.

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tersebut, terdapat penetapan pemerintah mengenai alokasi dan distribusi keuangan negara. Mengingat urgennya bidang ini dalam pembangunan perekonomian negara kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan

Rustam Anwar¹, Roni Mohamad², Muhdar HM³. Kuatkah APBN 2023 menghadapi guncangan resesi?

hasil penelitian (Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B., 2012) bahwa dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi adalah suatu kondisi kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB sementara kondisi kenaikan pajak berdampak menurunkan PDB.

Dampak positif dari pengeluaran pemerintah dan dampak negatif dari pajak terhadap PDB tersebut sejalan dengan teori Keynes tentang peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta sesuai dengan penelitian empiris di beberapa negara maju. Pengaruh pengeluaran pemerintah lebih dominan terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi dibandingkan dengan pajak.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi kemungkinan dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga (fiscuswannabe.web.id, 2013)

Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan *marginal propensity to consume* (MPC), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output.

Penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah (Dumairy, 1997) terdiri atas Penerimaan Perpajakan yaitu Pajak dalam negeri berupa :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas
- c. Barang Mewah (PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- f. Pajak lainnya
- g. Cukai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Parmadi (2011) dilihat dari struktur pajak di Indonesia sudah mulai di dominasi oleh pajak langsung (Pajak Penghasilan) meskipun pajak tidak langsung nilainya masih cukup besar (hampir sama dengan pajak langsung) sementara perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*) terus mengalami peningkatan yang berarti. Salah satu aspek penting dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, adalah pembaharuan sistem perpajakan haruslah makin mengarah pada terwujudnya prinsip keadilan dari pemungutan pajak. Keadilan pajak ditentukan oleh pihak yang menanggung beban akhir (*tax incidence*) akibat pengenaan pajak dalam perekonomian dan struktur tarif.

Klasifikasi pajak menurut Friedlaender (1984) menjadi dua golongan yaitu pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Menurut Damayanti, Theresia Woro dan Supramono (2005) menguraikan fungsi-fungsi pajak sebagai berikut:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

- b. Fungsi mengatur (*regulator*) yaitu fungsi untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut social dan ekonomi. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Sedangkan Pengeluaran pemerintah, adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan, (Sadono Sukirno, 2013).

Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penentuan anggaran pemerintah lebih pada : pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik; dan permasalahan yang dihadapi (Samuelson, 2005).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya.

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono, 1998) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam rangka menerapkan kebijakan fiskal, pemerintah suatu negara perlu menyusun suatu anggaran yang merangkum penerimaan dan pengeluarannya selama periode tertentu. Di Indonesia, anggaran pemerintah tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, APBN memiliki beberapa fungsi, yaitu (Wahyuningtyas, 2010) : 1. Fungsi otorisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa

Rustam Anwar¹, Roni Mohamad², Muhdar HM³. Kuatkah APBN 2023 menghadapi guncangan resesi?

anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. II-10 5. Fungsi stabilisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak tahun anggaran 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-Account menjadi I-Account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah atau Government Finance Statistics (GFS). Perbedaan antara T-Account dan I-Account terletak pada sistem pembayaran bunga dan cicilan utang. Pada T-Account, pembayaran bunga dan cicilan utang dijadikan satu dalam pengeluaran rutin. Sedangkan pada I-Account dipisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam belanja negara (Belanja Pemerintah Pusat), sedangkan pembayaran utang/cicilan pokok utang termasuk dalam pembiayaan anggaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mengelaborasi postor anggaran dalam APBN 2023 dan asumsi Makro sebagai dasar penyusunan dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh APBN Tahun 2023. Metode kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian. Fenomena, atau keadaan secara sosial.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ramalan pertumbuhan Ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,7 persen akibat kebijakan kontraksi yang dilakukan mengatasi tingginya inflasi akibat pandemi dan melonjaknya harga pangan dan energi akibat krisis geopolitik Rusia dan Ukraina. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pastinya akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia sebagai konsekwensi sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara saat ini. Indonesia sebagai bagian dari negara dengan sistem ekonomi terbuka juga pastinya akan terpengaruh dengan sentiman ekonomi Global. Dengan melihat indikator ekonomi pada tabel 1. beberapa asumsi makro diatas l yang akan dianalisis :

**Tabel 1. Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2023 (%)
(Kementerian Keuangan, RAPBN 2023)**

No	Label	Angka
1	Inflasi (%)	3,3
2	Suku Bunga (BI Rate %)	7,9
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14,750
4	Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	90\$/Barel
5	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	660 ppbh
6	Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.050 bsmph
7	Pendapatan Nasional	2.443,6 T
8	Belanja	3.041.7 T
9	Defisit	2,85 %

10	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3

Pemerintah memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%. Target ini sejalan dengan ramalan dari berbagai lembaga internasional lainnya yaitu pada rentang 4,7% hingga 5,1% . Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan *outlook* perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan hanya berada dikisaran 2,2% hingga 2,7%. Rendahnya target pertumbuhan global ini tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka yang membuka keran ekspor impor barang dan jasa dengan negara lain.

Namun menurut ekonom Chatib Basri posisi indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh resesi ekonomi dunia, meskipun pertumbuhan ekonomi indonesia akan melambat tapi tidak akan mengalami resesi. Indonesia justru mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga diantara negara G20. (Chatib Basri, 2022).

Secara teori, pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB yang komponennya sesuai rumusnya adalah :

$$Y = C + I + G + (E-M)$$

Dimana

Y : Pendapatan Nasional

C : Konsumsi

I : Investasi

G : Belanja Pemerintah

E : Ekspor

M: Impor

Jika melihat pengalaman selama masa Pandemi 2020-2022 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada diangka positif karena ditopang oleh variabel konsumsi. Untuk menopang konsumsi nasional, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 172,1 triliun pada tahun 2020 untuk mendorong konsumsi/ daya beli masyarakat. Dana tersebut dikucurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Strategi menjaga aktivitas konsumsi atau daya beli masyarakat ini adalah sangat tepat karena variabel konsumsi menurut Mankiw adalah 2/3 GDP, sehingga fluktuasi dalam konsumsi adalah elemen penting dari booming atau resesi Ekonomi. (Mankiw,2002).

Pengeluaran Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi pada triwulan III 2022. Pada triwulan III 2022, konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 5,4 persen yoy, meskipun mengalami normalisasi pasca periode Hari Raya Idulfitri di triwulan II. Pencapaian ini sejalan dengan membaiknya indikator konsumsi, termasuk rata-rata Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 5,5 persen pada triwulan III-2022 (yoy).

Keberhasilan Indonesia melakukan pemulihan ekonomi nasional selama sejak tahun 2020-2022 ini ditempuh dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Dimana Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. (Dedi Sasongko, 2020)

Menurut Dedi Sasongko, pemulihan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia ditempuh melalui 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu 1) peningkatan konsumsi dalam negeri, 2) peningkatan aktivitas dunia usaha serta 3) menjaga stabilitasi ekonomi

Rustam Anwar¹, Roni Mohamad², Muhdar HM³. Kuatkah APBN 2023 menghadapi guncangan resesi?

dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergy antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Menurutnya Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Untuk sektor dunia usaha pemerintah memberikan stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Selanjutnya dari sisi variabel investasi, pemerintah menstimulasi dunia usaha melalui kebijakan menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Aktivitas Investasi terus menguat. Kinerja investasi tumbuh relatif kuat sebesar 5,0 persen. Meskipun kinerja konstruksi masih tertahan, namun geliat investasi pembelian mesin dan kendaraan komersial yang tumbuh 36,5 persen dan 17,1 persen (yoy) mampu menopang kinerja investasi di triwulan III. Proses transformasi ekonomi yang sedang terjadi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan investasi di sepanjang tahun 2022. Distribusi aktivitas investasi kedua jenis ini terhadap total PMTB juga terus meningkat, dari sebelumnya secara rata-rata di tahun 2015-2019 sebesar 14,9 persen menjadi rata-rata 16.6 persen di triwulan I-III 2022.

Selanjutnya dari sisi aktivitas ekspor -impor, Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret 2022 justru mengalami surplus sebesar USD 4,5 milyar naik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat surplus USD 3,83 miliar. Kondisi ini melanjutkan trend surplus selama 23 bulan berturut-turut. Selama triwulan I 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar USD9,32 miliar meningkat sebesar 68,78% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun 2021 yang tercatat sebesar US\$5,52 miliar. Kinerja neraca perdagangan yang terus menguat inilah yang memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di di Tahun 2022. (BKF, 2022).

Ekspor Indonesia pada Maret 2022 tercatat mengalami surplus sebesar USD 26,50 miliar, lebih kuat dibandingkan bulan Pebruari sebesar 44,36% (yoy). Pertumbuhan ekspor pada komponen migas 54,8% (yoy) sedangkan non-migas

43,82% (yoy). “Pertumbuhan nilai ekspor ini bergerak mengikuti harga komoditas global yang terus meningkat sejak 2021 dan semakin tereskalasi karena terjadinya gangguan rantai pasokan/ *supply Chain* akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

Pertumbuhan ekspor sangat besar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia 2022 karena peningkatan ekspor ini juga berdampak pada aktivitas investasi dan konsumsi domestik” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Berdasarkan Nota Keuangan 2023 yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, disebutkan bahwa pada RAPBN tahun anggaran 2023 target Pendapatan Negara dan Hibah diproyeksikan sebesar Rp2.443,6 triliun, sedangkan kebutuhan Belanja Negara diperkirakan mencapai Rp3.041,7 triliun, sehingga defisit anggaran di tahun 2023 diperkirakan Rp598,2 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Secara lebih rinci, Pendapatan Negara dalam RAPBN 2023 terdiri dari penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun, PNBPN sebesar Rp426,3 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif yang diambil pemerintah ialah defisit anggaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Defisit anggaran disebabkan dari peningkatan belanja pemerintah, ketika pemerintah mengubah pengeluarannya perubahan itu mempengaruhi permintaan terhadap output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2007). Pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh terhadap perekonomian (Samuel dan Nordhaus, 2005). Awe (2014) menyatakan bahwa defisit anggaran memiliki hubungan negatif bagi pertumbuhan ekonomi, ketika defisit anggaran berkurang maka PDB akan naik. Naiknya PDB maka pertumbuhan ekonomi meningkat yang mengindikasikan bahwa naiknya kegiatan ekonomi nasional, berarti meningkatnya program-program pemerintah seperti bidang tenaga kerja berupa penyediaan lapangan pekerjaan, bidang kesehatan, pendidikan SDM, dan sebagainya (Indrawati, 2007).

Defisit RAPBN Tahun 2023 kembali dipatok dibawah angka 3 %, yaitu 2.85 %, kebijakan ini diambil seiring terjadinya pemulihan ekonomi nasional yang semakin membaik. Berbeda dengan tahun sebelumnya selama masa pandemi, APBN Indonesia mengalami defisit hingga 6, 14 % di Tahun 2020, 4,7 di Tahun 2021.

PENUTUP

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 yang masih kuat seperti diuraikan diatas menjadi modal positif pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2023. Berdasarkan kinerja positif perekonomian maka Pemerintah optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat terus menguat di tahun depan. Hal itu didukung dengan penguatan konsumsi dalam negeri, kinerja ekspor yang masih solid, serta laju inflasi yang terkendali. Disaat yang sama, Pemerintah juga terus mewaspadai risiko ketidakpastian yang tinggi akibat adanya *scarring effect* inflasi yang tinggi. Ketegangan geopolitik global dan pengetatan kebijakan moneter negara maju secara agresif pasti akan mempengaruhi gejolak pada perekonomian di tahun depan.

Dalam memitigasi hal tersebut Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN di tahun 2023 pada tiga fungsi besarnya melalui berbagai kebijakan fiskal. Pertama, APBN di 2023 akan berperan sebagai shock absorber saat terjadi gejolak pada perekonomian antara lain melalui kebijakan pemberian subsidi, kompensasi, maupun bantuan sosial. Kedua, APBN berperan sebagai tools untuk memitigasi berbagai risiko

Rustam Anwar¹, Roni Mohamad², Muhdar HM³. Kuatkah APBN 2023 menghadapi guncangan resesi?

fiskal yang berdampak pada perekonomian. Salah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko adalah melalui pengendalian atas defisit anggaran dan utang dalam APBN sehingga konsolidasi fiskal dapat tetap dijalankan di tahun 2023. Ketiga, peran APBN adalah menjaga momentum transformasi ekonomi yang tengah terjadi. Konsolidasi fiskal yang berkualitas diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun 2023 sebagaimana amanat dalam UU Nomor 2 tahun 2020, sehingga defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB di dalam APBN dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awe, A. A., & Funlayo, A. K. 2014. *The Short and Long-Run Implications of Budget Deficit*. Canadian Social Science, Vol. 10, No. 5
- Badan Kebijakan Fiskal, 2022. *Siaran Pers Volume 6*
- Basri, Chatib. 2022. *Ketidak Pastian Global dan Respon Kebijakan*. Kompas 3 Desember 2022
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4794/siapkan-berbagai-langkah-dan-strategi-pemerintah-optimis-jaga-ekonomi-nasional-diatas-pertumbuhan-global-pada-tahun-2023>
- Hutagaol, Yobel Rayfinando Tua., Sinurat, Ronaldo Putra Pratama., Shalahuddin, Sulthan Muhammad. *Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 4, No. 15
- Indrawati, B. 2007. *Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru dan Era Reformasi*. Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubraha Jaya
- Mankiw, N. G. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. 2005. *Economics (18 th edd ed.)*. Newyork: McGrawHil
- Sitepu, Rasidin karo., Fitriani, Indrianingtyas, Yulia., Mahesa, Raman., Mustikawati, Rindang., Puspita, nanda. 2022. *Model Makro-Ekonometrika Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia*. Kajian Ekonomi Keuangan 6 No.1
- Vanani, alvin Baharudin., Suselo, Dedi. 2021. *Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia Dimasa pandemic Covid-19*. Jurnal Menara Ekonomi, Vol. VII, No. 2
- Zakiah, Eneng Fitri., Arief Bowo Prayoga kasmoo., Nugroho, Lucky. 2022. *Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023*. Jurnal Cakrawal Ilmiah, Vol. 2, No. 4.